

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya jua lah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

ROSAILAKHYARI. P,S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19800629 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	dst
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANTUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	
BAB IV PENUTUP	

BAB I

DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Profil Biro

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut Biro, mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

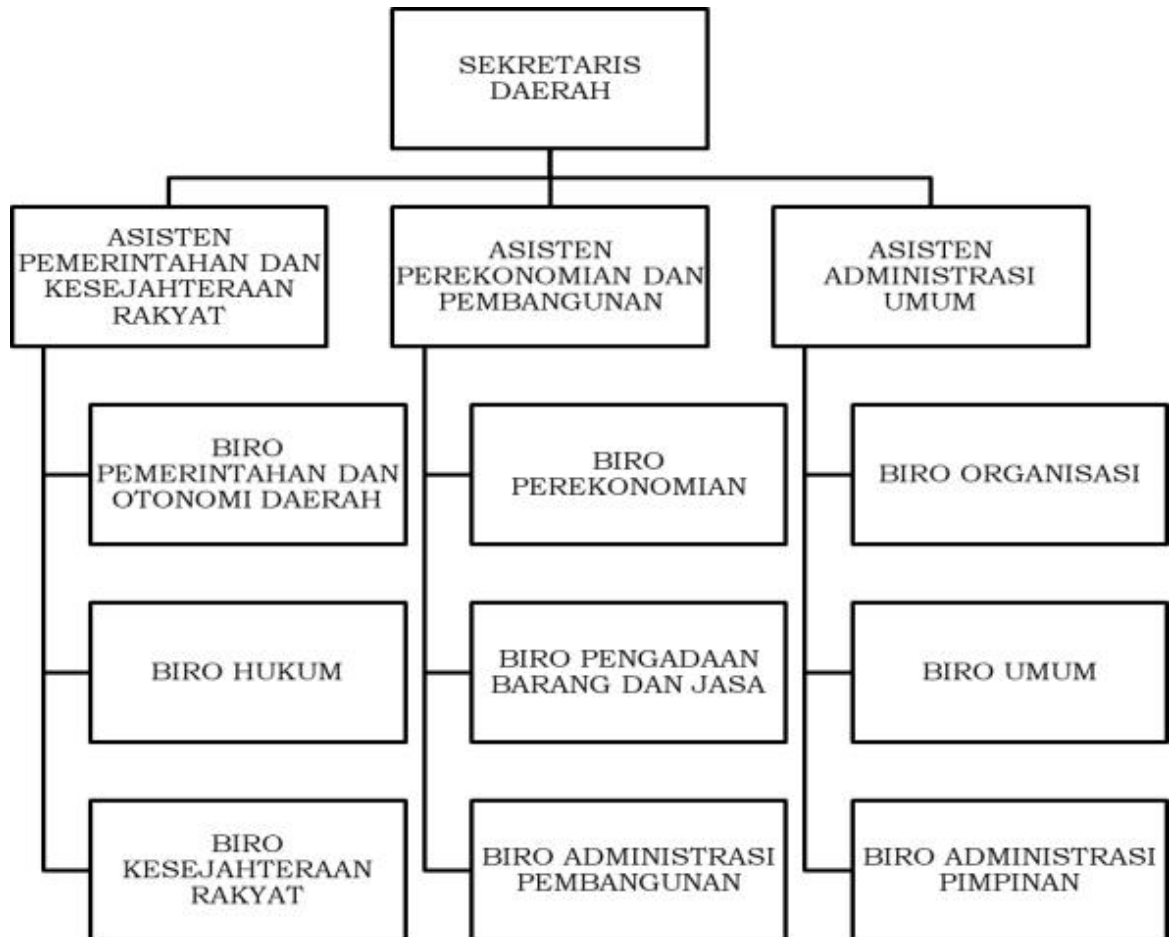
B. Struktur Organisasi

Dalam upaya mencapai tujuan dan fungsinya maka Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
-

Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro berada dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dengan posisi sebagai berikut :

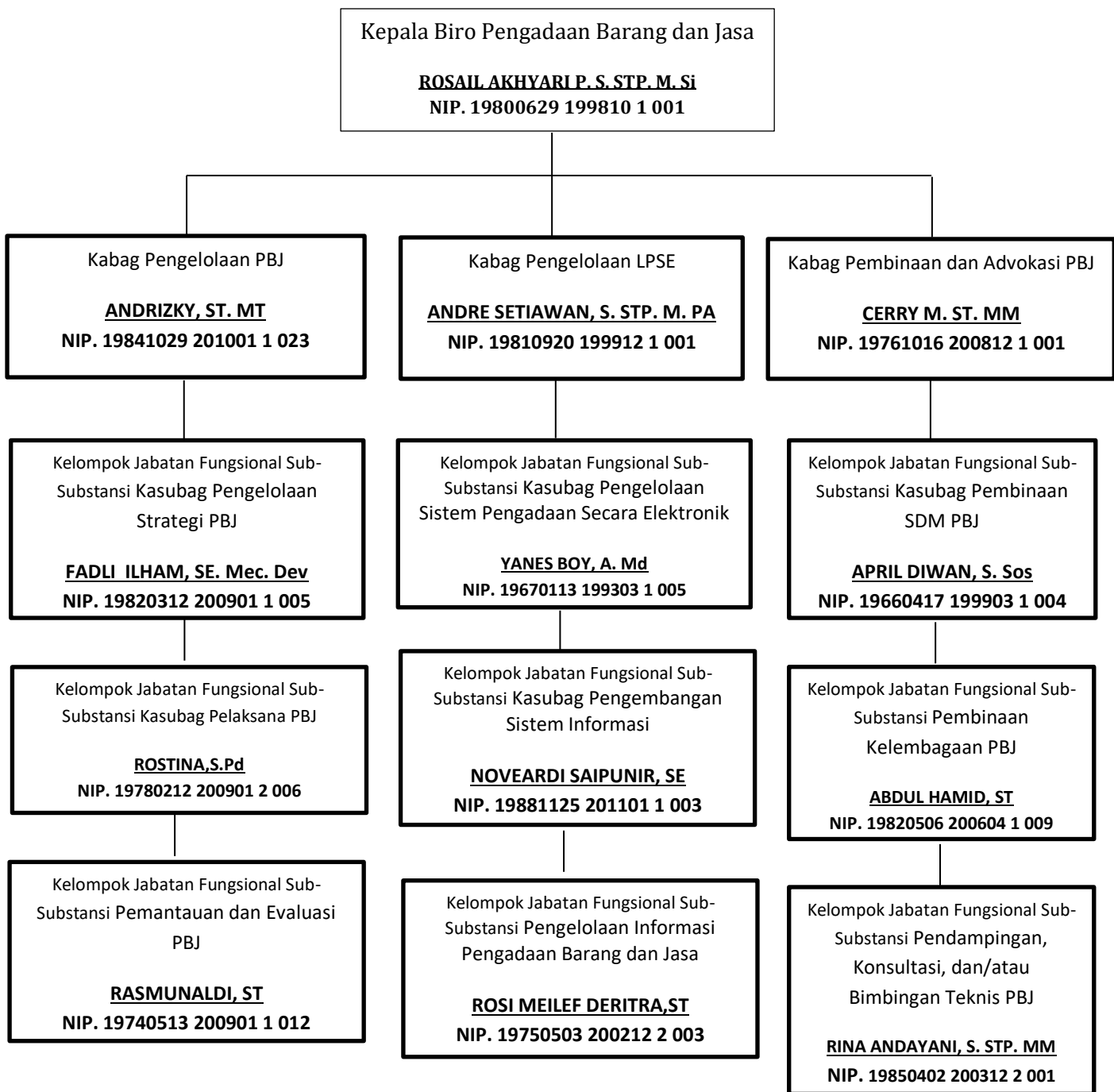
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Pada gambar diatas dapat dilihat Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, Struktur organisasi Biro itu sendiri sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat dari bagan struktur sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi BPBJ Sumatera Barat Tahun 2022



c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada didalamnya. Sumber Daya Manusia (SDM) akan bekerja secara optimal, jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 56 orang atau sekitar 12,37 % dari total 477 pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Diantara 56 orang pegawai tersebut terdapat 24 orang ditambah dengan 7 orang peyetaraan structural menjadi fungsional

yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF-PPBJ), 5 orang struktural dan sisanya sebanyak 23 orang sebagai fungsional umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.378.627019,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.316.868.167,00 atau 98,17%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B
II	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik	85%	98,17%	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target Kinerja dalam Perjanjian kinerja;
5. Kolom 4: Diisi dengan Realisasi Target Kinerja;
6. Kolom 5: Diisi dengan Persentase antara Target kinerja dengan realisasi.

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				100,00	1,254,650,754	1,224,961,888	97.63
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00	48,188,900	46,083,223	95.63
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	6,048,000	5,731,423	94.77
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2.074.800	1.949.200	94.98
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	11.516.695	9.328.700	89.6
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100,00	15,500,000	15,236,000	98.3
5.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	9,863,700	9,773,700	99.09

B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00	261,980,650	256,432,795	97.88
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	12 Bulan	100,00	223,503,90	219,953,900	98.41
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100,00	5,960,500	5,441,932	91.3
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	5,930,350	5,380,542	90.73
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	3,167,400	2,798,600	88.36
5.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Tahun	1 Tahun	100,00	4,028,700	4,025,200	99.91
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD		3 Jenis Laporan	3 Jenis Laporan	100,00	19,389,800	18,832,621	97.13
C.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				100,00	28,531,750	26,625,361	93.32

1.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	5,965,950	5,842,430	97.93
2.	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 Unit	3 Unit	100,00	16,500,000	15,548,425	94.23
3.	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	4,500,00	4,132,706	91.84
4.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100,00	1,565,800	1,101,800	70.37
D.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00	4,188,800	3,948,800	94.27
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Tahun	1 Tahun	100,00	2,988,800	2,988,800	100
2.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		23 Orang	23 Orang	100,00	1,200,000	960,000	80
E.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00	526,442,901	523,478,425	99.44
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Unit	10 Unit	100,00	42,311,500	42,200,000	99.74

2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		21 Unit	21 Unit	100,00	22,044,000	21,875,000	99.23
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100,00	29,905,100	29,831,500	99.75
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	14,333,000	14,327,000	99.96
5.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100,00	413,441,201	410,839,025	99.37
6.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		12 Bulan	12 Bulan	100,00	4,408,100	4,405,900	99.95
F.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00	113,039,00	111,591,840	98.72
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		83 Unit	83 Unit	100,00	24,339,000	24,339,000	100
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		65 Unit	65 Unit	100,00	88,700,000	87,252,840	98.37
G.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00	153,913,753	144,818,944	94.09
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	12 Bulan	100,00	1,984,000	1,966,000	99.09

2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20 Unit	20 Unit	100,00	9,550,000	9,150,000	95.81
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100,00	142,379,753	133,702,944	93.91
H.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00	118,365,000	111,982,500	94.61
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	100,00	42,240,000	40,240,000	95.27
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit 3 Unit	1 Unit 3 Unit	100,00	59,725,000	58,562,500	98.05
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel		6 Unit	6 Unit	100,00	3,500,000	3,500,000	100
4.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		47 Unit	47 Unit	100,00	12,900,000	9,680,000	75.04
II	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa				100,00	2,123,976,265	2,091,906,279	98.49

A.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100,00	774,848,020	765,015,148	98.73
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		7 Komoditi 3 Kategori 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	7 Komoditi 3 Kategori 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	100,00	81,366,300	79,797,785	98.07
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Laporan 550 Paket	1 Laporan 550 Paket	100,00	526,641,500	519,332,366	98.61
3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		12 Laporan	12 Laporan	100,00	166,840,220	165,884,997	99.43
B.	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100,00	635,019,540	632,623,281	99.62
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		19 Kab/Kota 51 OPD 5 Kab/Kota 1 Tahun 1 Unit 1 Tahun	19 Kab/Kota 51 OPD 5 Kab/Kota 1 Tahun 1 Unit 1 Tahun	100,00	365,940,000	365,147,405	99.78
2	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		19 Kab/Kota 51 OPD 1 Laporan 1 Unit 1 Aplikasi	19 Kab/Kota 51 OPD 1 Laporan 1 Unit 1 Aplikasi	100,00	191,602,540	191,023,769	99.7
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Dokumen 12 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen	100,00	77,477,000	76,452,107	98.68
C	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan				100,00	714,108,705	694,267,850	97.22

	Jasa							
1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		3 Kali 1 Kali 25 Orang	3 Kali 1 Kali 25 Orang	100,00	135,272,540	131,320,540	97.08
2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		15 Kab/Kota 2 Kali	15 Kab/Kota 2 Kali	100,00	202,031,350	197,936,492	97.97
3	Sub Kegiatan Pendampinga, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		4 Kali 1 Tahun 12 Paket 1 Tahun 1 Tahun	4 Kali 1 Tahun 12 Paket 1 Tahun 1 Tahun	100,00	376,804,815	365,010,818	96.87

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan Target dalam dokumen anggaran;
5. Kolom 5: Diisi dengan Realisasi Target dalam dokumen anggaran;
6. Kolom 6: Diisi dengan Persentase antara Target dengan realisasi.
7. Kolom 7 : Diisi dengan Alokasi Anggaran
8. Kolom 8 : Diisi dengan Realisasi Anggaran
9. Kolom 9 : Diisi dengan Persentase Realisasi

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
1	<p>Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan regulasi dari perpres 16 tahun 2018 menjadi perpres 12 tahun 2021 2. Menunggu aturan turunan terkait perubahan regulasi tersebut dan juknisnya 3. Tahun 2021 merupakan tahun pergantian kepala daerah yang mengakibatkan perubahan arah kebijakan dan rencana pembangunan. 4. Penerapan aplikasi SIPD pertama kali dimana OPD belum menguasai aplikasi tersebut. 5. Terlambatnya penginputan RUP akibat SIPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi dan FGD terkait regulasi - regulasi PBJ yang dinamis. 2. Percepatan pelaksanaan kegiatan 3. Strategi penugasan personil pengelola PBJ melalui pengelompokan sesuai jenis pengadaan barang dan jasa sehingga durasi pelaksanaan pemilihan dapat dioptimalkan. 	
	<p>Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan : Pengelola layanan Pengadaan Secara Elektronik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya aplikasi dan fitur-fitur pendukung kinerja PBJ 2. Belum optimalnya backup server 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan anggaran dalam rangka pembuatan aplikasi, fitur-fitur dan tools pendukung percepatan dan peningkatan kinerja PBJ 	
	<p>Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. keterbatasan personil pada pembinaan dan advokasi 2. keterbatasan anggaran untuk pembinaan SDM 3. belum samanya persepsi antara tim pemeriksa dan APH dengan pelaku pengadaan. 4. Belum ada forum komunikasi yang efektif antara pelaku pengadaan, tim pemeriksa dan APH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi SDM pada UKPBJ melalui penugasan lintas bidang 2. Optimalisasi anggaran focus pada peningkatan kompetensi SDM PBJ. 3. Mengaktifkan forum clearing house 	

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan;
3. Kolom 3: Diisi dengan Permasalahan masing-masing Program/Kegiatan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Upaya mengatasi permasalahan;
5. Kolom 4: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021;

2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

- a. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan output kegiatan ini bertujuan mewujudkan proses pengadaan yang tepat waktu dan melalui proses evaluasi, klasifikasi, teknis untuk mendapatkan penyedia yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan serta pelaksanaan proses pengadaannya yang lebih awal untuk menghindari gagal tender sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat digambarkan bahwa kegiatan ini mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program di dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang kinerja pemerintah daerah di dalam proses pengadaan barang dan jasa.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana table berikut :



Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	<p>1. Diskusi dan FGD terkait regulasi - regulasi PBJ yang dinamis.</p> <p>2. Percepatan pelaksanaan kegiatan</p> <p>3. Strategi penugasan personil pengelola PBJ melalui pengelompokan sesuai jenis pengadaan barang dan jasa sehingga durasi pelaksanaan pemilihan dapat dioptimalkan.</p>	Perpres 12 tahun 2021, perlem 12 tahun 2021, Aturan Turunannya.	<p>1. Menghindari penumpukan beban kerja pada personil UKPBJ pada waktu tertentu sehingga tidak terjadi keterlambatan proses pemilihan.</p> <p>2. Meminimalkan potensi putus kontrak diakhir tahun anggaran</p> <p>3. Menghindari peristiwa pemberian kesempatan melewati tahun anggaran</p> <p>4. Percepatan penyerapan anggaran</p> <p>5. Meningkatkan ekonomi masyarakat</p>
2	Penambahan anggaran dalam rangka pembuatan aplikasi, fitur-fitur dan tools pendukung percepatan dan peningkatan kinerja PBJ	Perpres 12 tahun 2021, perlem 12 tahun 2021, Aturan Turunannya.	Percepatan dan peningkatan kinerja pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
3	<p>1. Optimalisasi SDM pada UKPBJ melalui penugasan lintas bidang</p> <p>2. Optimalisasi anggaran focus pada peningkatan kompetensi SDM PBJ.</p> <p>3. Mengaktifkan forum clearing house</p>	Perpres 12 tahun 2021, perlem 12 tahun 2021, Aturan Turunannya.	<p>1. Terlaksananya seluruh fungsi UKPBJ</p> <p>2. Pemerataan beban kerja</p> <p>3. Peningkatan kopetensi SDM PBJ</p> <p>4. Terjalinnnya komunikasi yang baik antara pelaku pengadaan dengan tim pemeriksa dan APH</p> <p>5. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap regulasi</p> <p>6. Memberikan solusi atau penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dan atau pelaksanaan kontrak</p> <p>7. Terlaksananya advokasi dalam rangka peyelesaian dan pencegahan permasalahan.</p>

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi kebijakan strategis yang diprakarsai oleh perangkat daerah;
3. Kolom 3: Diisi peraturan tentang kebijakan strategis tersebut berupa Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan terbitnya kebijakan strategis tersebut.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	-	-	-

Catt : Tidak terdapat rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan Laporan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 tanggal 18 april 2022.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6
Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Pansus LKPJ atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat ATA 2021 yang ditujukan pada dinas terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7
Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1.	Fraksi PKS secara umum sepakat untuk memberikan punishment terhadap actor yang dianggap lambat sehingga menyebabkan terjadinya bal-hal yang kami sampaikan dalam point 1. Punishment bisa diberikan kepada ASN penanggung jawab, dan pihak swasta yang lalai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sanksi ini harus tegas dan keras dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang dimasa yang akan datang.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan Punishment kepada ASN penanggung jawab dan pihak swasta yang lalai dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 1. Pemberian pembinaan dapat melalui mekanisme pengawasan oleh APIP.	Agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Rekomendasi Fraksi atas LKPJ Gubernur Sumatera Barat TA 2021 yang ditujukan pada OPD terkait;
3. Kolom 3: Diisi dengan nomenklatur program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD yang ditujukan pada dinas/biro tersebut;
4. Kolom 4: Diisi dengan tujuan atau masalah yang diselesaikan dengan adanya program dan kegiatan serta alokasi anggarannya dalam menindaklanjuti Rekomendasi DPRD.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Penilaian Final ITKP KLPD tahun 2022 (Predikat Baik dengan capaian Nilai 73,7)	LKPP RI	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Biro PBJ)	22 November 2022
2	Tingkat pencapaian level Kematangan UKPBJ 8/9. (peningkatan level kematangan dari 3/9 menjadi 8/9)	LKPP RI	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Biro PBJ)	Desember 2022

Keterangan:

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi Nama penghargaan;
3. Kolom 3: Diisi nama pemberi penghargaan dan lembaga pemberi penghargaan;
4. Kolom 4: Diisi Perangkat Daerah Penerimaan Penghargaan;
5. Kolom 5: Diisi tempat dan tanggal penerimaan penghargaan;

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Sumber: .Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat , 2022

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 juga tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Sumber: .Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat , 2022

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan yang dimaksud.

b. Upaya Penyelesaian

Sebagaimana halnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak melaksanakan tugas Pembantuan, maka dalam hal ini tidak melakukan upaya penyelesaian yang dimaksud.

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan pada tahun anggaran 2022, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, /kegiatan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara tepat waktu.
- 2) Dst...

b. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Bimbingan teknis dan rapat koordinasi secara bulanan untuk mempercepat proses pelaksanaan program dan kegiatan penugasan;
- 2) Dst.....

(Uraian diatas adalah contoh agar diisi dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Apabila Dinas/Biro tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan maka diberikan keterangan yang menyatakan bahwa Dinas/Biro pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan)

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.
